

BAB II

DINAMIKA KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Amerika Serikat merupakan negara adikuasa yang mempunyai kekuatan ekonomi dan militer terdepan di dunia dengan kepentingan global dan jangkauan global yang tidak tertandingi. Dalam ekonomi global, Amerika Serikat menjadi pendorong utama dan pemimpin dunia dalam investasi dan perdagangan internasional, inovasi dan teknologi baru, kapitalisasi pasar saham dan pangsa perusahaan global yang besar. Produk domestik bruto Amerika Serikat menyumbang hampir seperempat dari total dunia dan anggaran militernya diperhitungkan hampir sama banyak dengan pengeluaran pertahanan dunia yang disatukan. Perkiraan belanja militernya diperkirakan sebesar \$ 886 miliar. Belanja militer menjadi pengeluaran kedua terbesar Amerika Serikat setelah jaminan sosial.

Terdapat empat komponen yang menjadi alasan besarnya pengeluaran anggaran militer Amerika Serikat. Pertama adalah anggaran dasar sebesar \$ 597,1 miliar ke Departemen Pertahanan. Kedua adalah anggaran sebesar \$ 88,9 miliar ke Departemen Pertahanan untuk operasi kontijensi di luar negeri untuk melawan kelompok Islam. Ketiga adalah jumlah instansi lain yang melindungi negara sebesar \$ 181,3 miliar. Instansi-intansi tersebut yaitu Departemen Urusan veteran (\$ 83,1 miliar), Homeland Security (\$ 46 miliar), FBI dan Cybersecurity di Departemen Kehakiman (\$ 8,8 miliar) dan Administrasi Keamanan Nuklir Nasional di Departemen Energi (\$ 15,1 miliar). Lalu yang keempat adalah dana untuk Departemen Luar Negeri dan

Keamanan Dalam Negeri untuk melawan ISIS sebesar \$ 18,7 miliar.¹⁶

Tujuan militer Amerika Serikat adalah untuk membelanya dari serangan. Selain itu adalah untuk melindungi warga Amerika Serikat di luar negeri, sekutu dan kebebasan menggunakan udara, laut, dan ruang internasional. Amerika Serikat juga bertujuan untuk membela diri dan kepentingannya dan mencegah musuh atau oportunis mengambil tindakan yang akan menghambat kepentingan Amerika Serikat, serta kemampuan untuk mencegah destabilisasi suatu wilayah dan menjaga perdamaian maupun keamanan sekutu Amerika Serikat.¹⁷

Sebagai negara adikuasa, Amerika Serikat mempunyai peran besar dalam panggung global dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dunia. Hal yang dilakukan adalah dengan aktif dalam politik luar negeri. Politik luar negeri Amerika Serikat meliputi berbagai kebijakan yang berupa kebijakan diplomatik, kebijakan ekonomi dan kebijakan keamanan/militer. Pada dasarnya, politik luar negeri tidak pernah bersifat tetap. Seperti halnya dengan perubahan kebijakan luar negeri suatu negara yang dipengaruhi oleh perubahan kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri melibatkan cita-cita, strategi, tindakan, metode, panduan, arahan, pemahaman, kesepakatan, dan sebagainya, yang dengannya pemerintah nasional saling melakukan hubungan internasional dan dengan organisasi internasional serta aktor-aktor non-pemerintah. Kebijakan luar negeri terdiri dari tujuan dan tindakan yang dimaksudkan untuk memandu keputusan

¹⁶ Kimberly Amadeo, "U.S. Military Budget: Components, Challenges, Growth" dalam <https://www.thebalance.com/u-s-military-budget-components-challenges-growth-3306320> , diakses pada 9 Februari 2018.

¹⁷ US Military Strength, "US Military Power" dalam <https://index.heritage.org/military/2017/assessments/us-military-power/> , diakses pada 7 Februari 2018.

dan tindakan pemerintah menyangkut urusan-urusan eksternal, terutama dengan negara-negara asing. Pengelolaan hubungan luar negeri menghendaki agar mempertimbangkan dengan hati-hati rencana tindakan yang diambil untuk kepentingan dan urusan luar negeri yaitu cita-cita pemerintah.¹⁸

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat mencakup berbagai aspek dan isu baik dengan tujuan menjaga perdamaian dunia maupun untuk kepentingan nasionalnya sendiri. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga mengalami dinamika perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi domestik dan maupun internasional untuk menyesuaikan perubahan kepentingan Amerika Serikat dari waktu ke waktu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Amerika Serikat yang mencakup tingkat kepentingan pemerintahan Amerika Serikat, kualitas informasi dan pengetahuan yang tersedia di berbagai pemerintahan dan kendala yang ada pada pemerintahan Amerika Serikat maupun kendala yang ada pada suatu wilayah.¹⁹

Perubahan kepentingan nasional Amerika Serikat juga bisa dilihat dari pergantian fokus Amerika Serikat akan keadirannya terhadap suatu wilayah. Tentu Amerika Serikat memiliki berbagai kepentingan di berbagai wilayah namun terkadang dalam upaya menanggapi suatu isu, Amerika Serikat memfokuskan kehadirannya di suatu regional. Pada awal tahun 2000an, dalam upaya menanggapi isu terorisme yang terjadi paska tragedi 9/11, Amerika Serikat fokus terhadap isu ini dan mulai memfokuskan kehadirannya di Timur Tengah.

¹⁸ Robert Jackson dan georg Sorensen, *“Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 439.

¹⁹ Stanley A. Kochanek, *“US Foreign Policy in South Asia”* dalam <http://www.jstor.org/stable/41393438> , diakses pada 9 Febuari 2018.

A. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah

Setelah tragedi 9/11, kebijakan luar negeri Amerika Serikat berubah sangat mencolok dalam berbagai cara. Perubahan nyata dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah fokusnya pada tindakan pencegahan yang dikenal sebagai Doktrin Bush. Doktrin Bush ini adalah strategi pencegahan teroris atau rezim berbahaya yang mengembangkan, memperoleh ataupun menggunakan senjata pemusnah massal. Strategi ini juga mendorong perluasan demokrasi di negara-negara Muslim di Timur Tengah maupun di tempat lain di dunia.²⁰

Doktrin ini secara resmi diresmikan pada bulan September 2002 yang berfokus pada tiga hal. Yang pertama adalah perang preventif.²¹ Perang preventif merupakan indikasi strategi yang berusaha untuk mempertahankan dengan menyerang mereka yang menjadi ancaman langsung dan membiarkan kebijakan untuk membenarkan pencarian militer sepihak untuk kepentingan Amerika secara khusus.²² Yang kedua adalah tindakan sepihak oleh Amerika Serikat jika perlu membela diri baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga adalah penyebaran demokrasi dan kebebasan di

²⁰ Constitutional Right Foundation, “*The Bush Doctrine*” dalam <http://www.crf-usa.org/war-in-iraq/bush-doctrine.html> , diakses pada 9 Februari 2018.

²¹ Gary L. Gregg II, “*GEORGE W.BUSH: FOREIGN AFFAIRS*” dalam <https://millercenter.org/president/gwbush/foreign-affairs> , diakses pada 9 Februari 2018.

²² Ukessay, “*Changes in US Foreign Policy after 9/11*” dalam <https://www.ukessays.com/services/example-essays/international-relations/changes-in-us-foreign-policy-after-9-11.php> , diakses pada 9 Februari 2018.

seluruh dunia yang berfokus pada konsep kebebasan individu, perdagangan bebas, dan pasar bebas.²³

Setelah tragedi 9/11 ini, “*War on Terrorism*” menjadi perhatian utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Amerika Serikat mulai menyerang beberapa kelompok Islam yang sebagian besar berada di Timur Tengah, seperti kelompok Al-Shabaab di Somalia, Taliban di Afghanistan, Al-Qaeda di Afghanistan dan Irak, dan negara Islam Irak dan Suriah, untuk mempertahankan kepentingan keamanan nasional di seluruh dunia. Amerika Serikat memiliki keyakinan bahwa kelompok-kelompok Islam ini melakukan interpretasi radikal terhadap Islam dan sangat menentang Barat. Amerika Serikat juga yakin bahwa kelompok-kelompok ini merupakan ancaman besar bagi Amerika Serikat, kepentingan keamanan sekutunya, dan stabilitas seluruh kawasan.²⁴

Keterlibatan Al Qaeda dalam serangan 9/11 membuat kelompok ini menjadi salah satu sasaran penyerangan. Setelah serangan 11 September tersebut tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2001, Amerika Serikat meluncurkan operasi “*Enduring Freedom*” di Afghanistan yang merupakan tempat dimana Taliban berada, setelah Taliban menolak untuk menyerahkan pemimpin Al-Qaeda yaitu Osama bin Laden. Amerika Serikat menggulingkan Taliban dalam waktu hitungan minggu dan pada bulan November, sekitar 1.000 tentara Amerika dikerahkan ke Afghanistan dan meningkat menjadi 10.000 pada tahun setelahnya.²⁵

²³ Gary L. Gregg II, Loc. Cit.

²⁴ Atallah S. Al Sarhan, “*United States Foreign Policy and the Middle East*” dalam <https://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=78991>, diakses pada 10 Febuari 2018.

²⁵ Aljazeera, “*Timeline: US intervention in Afghanistan 2001 to 2017*” dalam <https://www.aljazeera.com/news/2017/08/2001-2017->

Tidak hanya Afghanistan, Iraq yang dianggap menjadi sarang Al Qaeda membuat perhatian besar tercurahkan pada kawasan Timur Tengah yang mana kelompok-kelompok Islam ekstrimis berasal dari negara-negara di kawasan tersebut. Setelah invansi Afghanistan, Presiden Bush menuduh Iraq mendukung terorisme. Bush mengklaim bahwa ada hubungan antara Iraq, Saddam Hussein, dan Al-Qaeda, serta pertemuan personel intelijen Iraq dengan Osama bin Laden di Sudan.²⁶

Pada Febuari 2003, pemerintahan George W. Bush mengembangkan Strategi Nasional untuk Memerangi Terorisme untuk melawan terorisme di seluruh dunia. Rencana ini merupakan strategi untuk mengalahkan teroris dan organisasi mereka untuk menolak sponsor, dukungan, dan perlindungan bagi teroris, untuk meminimalkan kondisi sosial dan ekonomi yang dieksploitasi teroris, dan untuk membela warga negara Amerika Serikat dan kesejahteraan di rumah dan di luar negeri.²⁷ Lalu pada 19 Maret 2003, Amerika Serikat menginvasi Iraq dan meruntuhkan rezim Saddam Hussein. Invansi tersebut pada dasarnya dikatakan untuk mencegah Iraq memasok senjata ke teroris karena Saddam Hussein dan Al Qaeda dikatakan memiliki keterkaitan dan pemerintah AS mengatakan bahwa rezim Saddam Hussein mempunyai bahan nuklir yang dapat segera memproduksi senjata atom.²⁸ Bush menuduh rezim Iraq melanggar hak asasi manusia, memiliki senjata pemusnah massal, dan menyembunyikan para

[intervention-afghanistan-170822035036797.html](http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A50679-2004Jun17.html) , diakses pada 12 Febuari 2018.

²⁶ Dana Milbank, “*Bush Defends Assertions of Iraq-Al Qaeda Relationship*” dalam <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A50679-2004Jun17.html> , diakses pada 12 Febuari 2018.

²⁷ George W. Bush, “*National Strategy for Combating Terrorism*” dalam <https://www.state.gov/documents/organization/60172.pdf> , diakses pada 12 Febuari 2018.

²⁸ Steve Jones, Loc. Cit.

pemimpin teroris. Oleh karena itu, rezim Irak dianggap mengancam keamanan dan stabilitas kawasan Timur Tengah.

B. Kebijakan Luar Negeri Amerika di Asia Pasifik

1. Kebijakan Luar negeri Amerika Serikat di Asia Pasifik Pada Masa Presiden George W. Bush

Pada masa pemerintahan Bush, Amerika Serikat lebih berfokus pada Timur Tengah daripada Asia Pasifik, namun hal ini tidak membuat Amerika Serikat melupakan kepentingan-kepentingannya yang ada di Asia Pasifik karena pada awal 2000an ini Cina sudah mulai menarik perhatian dunia akan kemajuannya. Serangan 9/11 membuat Amerika Serikat memiliki peluang untuk mendekati Cina sebagai sekutu dalam upaya perang melawan terorisme dan mendapatkan bantuannya dalam menangani negara-negara bermasalah seperti Iran dan Korea Utara atas kepemilikan nuklir. Peningkatan hubungan Amerika Serikat dan Cina dapat dikatakan merupakan konsekuensi dari serangan 9/11. Pemerintahan Bush mengatakan bahwa bantuan Cina sangat penting untuk membuat kemajuan dalam menangani Korea Utara dan bersyukur bahwa Cina tidak membuat keributan mengenai invasi ke Irak. Pemerintahan Bush menyambut kerjasama Cina dalam perang teror yang memungkinkan Cina bekerjasama dengan cara yang tidak membuatnya tunduk kepada Amerika Serikat. Cina juga memiliki alasan bagus untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam menghadapi masalah Korea Utara. Dalam hal ini, Amerika Serikat mendukung Cina dalam konflik yang sedang berlangsung dengan suku Uyghur di Provinsi Xinjiang.²⁹

²⁹ Robert J. Lieber, *The American Era: Power and Strategy for The 21st Century*, Cambridge University Press, New York, 2005, hlm.171-172.

Di kawasan Asia Pasifik, kebijakan Amerika Serikat cenderung bergerak pada negara-negara besarnya. Terlepas dari kebangkitan Cina, aktivisme India, dan normalisasi tambahan Jepang, keseimbangan kekuasaan di kawasan Asia Pasifik masih didasarkan pada keunggulan Amerika. Hubungan Sino-Jepang menonjol dan memiliki implikasi yang signifikan bagi Amerika Serikat.³⁰ Bush memiliki hubungan yang baik dengan Perdana Menteri Jepang yang memfasilitasi kerja sama dalam isu internasional dan memperkuat aliansi AS-Jepang dengan mengembangkan koordinasi militer dan menyetel kembali basisnya di Jepang.³¹

Disisi lain, hubungan Amerika Serikat dan India juga bergerak maju dengan adanya kesepakatan penggunaan energi nuklir secara damai. Pada tahun 2004, Amerika Serikat dan India mengeluarkan pernyataan bersama mengenai kemitraan Amerika Serikat dan India dalam kerja sama di bidang trinitas dan memperluas dialog tentang pertahanan rudal. Inisiatif ini disebut dengan *Next Steps in Strategic Partnership (NSSP)*. Pada 2005, sebuah kerangka kerja baru diumumkan dengan meletakkan strategi yang lebih luas dan hubungan militer. Kerangka kerja NSSP yang baru ini meningkatkan kerjasama bilateral dalam link satelit komersial, dan revisi beberapa kesepakatan lisensi ekspor AS untuk penggunaan ganda tertentu dan item nuklir sipil.³²

³⁰ East West Centre, “*Challenges for U.S.-Asia Pacific Policy in the Second Bush Administration*” dalam <https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/SeniorPolicySeminar2005.pdf?file=1&type=node&id=32110> , diakses pada 12 Februari 2018.

³¹ Brookings, “*Asia Policy: The Big Picture*” dalam https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/obamaandchinasrise_chapter.pdf , diakses pada 12 Februari 2018.

³² Umbreen Javaid dan Qamar Fatima, “*US Foreign Policy Parameters towards Pakistan and India (2001-2008)*” , Journal of Political Studies, Vol. 19, Issue - 2, 2012.

Diantara hubungan militer bilateral resmi Amerika Serikat di Asia Pasifik, yang paling penting adalah dengan Jepang dan Korea Selatan. Amerika Serikat mempertahankan pangkalan militer dan puluhan ribu pasukan di kedua negara tersebut. Berikut adalah tabel mengenai jumlah penyebaran militer Amerika Serikat di Asia:

Tabel 1 1 Data Penyebaran Militer Amerika Serikat di Asia Tahun 2004-2005

| Lokasi | Tentara | Angkatan Udara | Angkatan Laut | Mariner | Jumlah |
|---------------|---------|----------------|---------------|---------|--------|
| Singapura | | 39 | 50 | | 89 |
| Jepang | 1.750 | 14.700 | 9.250 | 17.850 | 43.550 |
| Korea Selatan | 25.000 | 8.900 | 420 | 180 | 34.500 |
| Guam | | 2.100 | 2.300 | | 4.400 |
| Australia | | 59 | | 31 | 90 |
| Diego Garcia | | 901 | 370 | | 1.271 |
| Thailand | | 30 | 10 | 29 | 69 |
| Jumlah | | | | | 83,969 |

Sumber: Tabel berdasarkan data dari International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance: 2004-2005*, diambil dari buku *The American Era: Power and Strategy for The 21st Century*.

Seiring dengan perkembangan di tempat lain di kawasan ini, total penyebaran militer Amerika Serikat di Asia berjumlah sekitar 84.000. Namun, peran keamanan Amerika Serikat jauh melampaui kehadiran pasukan dan pangkalan dengan menggabungkan unsur-unsur yang bersifat politik, diplomatik, ekonomi, dan bahkan psikologis. Misalnya dalam kasus Cina dan Taiwan, kebijakan strategis Amerika berfungsi

untuk mengurangi resiko terjadinya konflik terbuka. Sementara itu Amerika Serikat menyiratkan bahwa akan membantu untuk membela Taiwan.³³ Hal ini dimulai ketika pada bulan April 2001, Bush menyatakan akan membantu Taiwan dalam mempertahankan diri dari Cina.³⁴ Selama pemerintahan Bush, terdapat penyesuaian kebijakan utama untuk Taiwan yang sesuai dengan situasi internasional yang mencuat. Kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan telah dianggap sebagai tanda bahwa Amerika Serikat ingin menjalankan prinsip strategi di Asia. Amerika Serikat merupakan kekuatan yang dominan di Asia maupun dunia, sehingga setiap perubahan dalam kebijakannya terhadap Taiwan akan berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut.

Di sisi lain di Asia, Amerika Serikat aktif terlibat dalam hubungan politik yang penting dengan negara-negara lain seperti Filipina, Indonesia, Australia, Vietnam, India, dan Pakistan. Selain itu, Amerika Serikat juga mengambil bagian dalam Dewan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang berfungsi sebagai forum dengan pembahasan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi yang beranggotakan 21 negara dari Amerika dan Asia. Amerika Serikat juga berpartisipasi dalam Forum Regional ASEAN (ARF) yang direhabilitasi sebagai dialog keamanan diantara 23 bidang di Asia Pasifik.³⁵

³³ Robert J. Lieber, Op. Cit. Hlm.159-160

³⁴ DAVID E. SANGER, “U.S. WOULD DEFEND TAIWAN, BUSH SAYS” dalam <https://www.nytimes.com/2001/04/26/world/us-would-defend-taiwan-bush-says.html> , diakses pada 12 Febuari 2018.

³⁵ Robert J. Lieber, Op. Cit. Hlm. 160

2. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Asia Pasifik Pada Masa Presiden Barack Obama

Pada masa pemerintahan Bush, terlihat bahwa Amerika Serikat lebih condong kepada Timur Tengah dan dengan serius memberantas teroris-teroris yang ada disana. Ketika Obama terpilih menjadi Presiden, Obama mewarisi dua perang yaitu perang di Iraq dan di Afghanistan. Ketika kampanye pemilihan pada 2008, Obama berjanji untuk menarik pasukan Amerika sesegera mungkin dan hal ini terlaksana sesuai janji. Pada Februari 2009, Obama mengumumkan rencana untuk menurunkan tingkat pasukan dari 160.000 menjadi 50.000 pada bulan Agustus 2010 yang termasuk dengan pemindahan semua pasukan tempur kemudian pasukan yang tersisa akan ditarik pada akhir tahun 2011. Lalu pada 2012 menurun menjadi hanya 150 tentara yang berada di Iraq.³⁶

Sedangkan Obama terlihat lebih tertarik pada kawasan Asia Pasifik dengan melihat peningkatan kekuatan negara-negara yang berada di kawasan tersebut. Peningkatan kekuatan Cina telah menjadi perhatian masyarakat global. Meningkatnya Cina dalam bidang ekonomi maupun keamanan membuat Cina menjadi mitra dagang utama hampir di semua negara di kawasan Asia. Namun tidak hanya Cina, negara-negara lain di kawasan ini juga telah mengalami kemajuan seperti Jepang, Korea Selatan dan India.

Pertumbuhan Asia ini sangat penting bagi Amerika Serikat dalam menerapkan kepentingannya di kawasan tersebut. Secara ekonomi, pasar terbuka di Asia memberikan kesempatan Amerika Serikat untuk melakukan perdagangan maupun investasi. Secara strategis, menjaga perdamaian dan

³⁶ Michael Nelson, "*Barack Obama: Foreign Affairs*" dalam <https://millercenter.org/president/obama/foreign-affairs> , diakses pada 14 Februari 2018.

keamanan di Asia Pasifik sangat penting bagi kemajuan global, baik itu dengan mempertahankan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, melawan upaya profelirasi Korea Utara ataupun memastikan transparansi dalam kegiatan militer oleh negara-negara di kawasan ini.³⁷

Dengan latar belakang tersebut, Presiden Barack Obama mengindikasikan niat pemerintahnya untuk menfokuskan kebijakan Amerika Serikat ke kawasan Asia Pasifik.³⁸ Presiden Obama memerintahkan untuk melakukan tinjauan kembali mengenai strategi global Amerika Serikat. Tinjauan tersebut menemukan ketidakseimbangan dalam fokus global Amerika Serikat, yang terlalu condong ke Eropa dan Timur Tengah. Sebagai tanggapan terhadap penemuan tersebut, pada 2011 Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas perannya di Asia Pasifik.³⁹

Rencana ini ditujukan untuk meningkatkan investasi dalam kemitraan ekonomi, diplomatik dan strategis di kawasan ini. Pemerintah Amerika Serikat juga berencana untuk melakukan perluasan perdagangan dan investasi di seluruh Asia, peningkatan keterlibatan dalam lembaga multilateral regional, dan penempatan kehadiran militer dan promosi demokrasi dan hak asasi manusia di wilayah ini.⁴⁰

³⁷ Hillary Clinton, “*America’s Pacific Century*” dalam <http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/> , diakses pada 14 Febuari 2018.

³⁸ Choi Kang, “*A Changing East Asia and U.S Foreign Policy*” dalam <https://www.cfr.org/report/changing-east-asia-and-us-foreign-policy> , diakses pada 14 Febuari 2018.

³⁹ Colonel Chris Mills, “*The United States’ Asia-Pacific Policy and the Rise of the Dragon*” dalam <http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/IndoPac/R23177605-1.pdf> , diakses pada 15 Febauri 2018.

⁴⁰ DW, “*Asia Pacific region becomes main focus of US foreign policy*” dalam <http://www.dw.com/en/asia-pacific-region-becomes->

Kebijakan ini disebut dengan “*Pivot to Asia*” atau “*Asia Rebalance*” yang terdiri dari enam jalur usaha yang diantaranya adalah memperkuat aliansi keamanan, memperluas perdagangan dan investasi, memperluas kehadiran militer, memperdalam kekuatan dengan kekuatan yang muncul, melibatkan institusi multilateral regional, dan memajukan demokrasi dan hak asasi manusia.⁴¹ Dalam tindak lanjutnya, pemerintah Amerika Serikat fokus dalam menciptakan keseimbangan militer yang bertujuan untuk membenahi dominasi ekonomi.⁴²

Pivot to Asia ini diumumkan pertama kali pada tahun 2011 oleh Sekretaris Negara Amerika Serikat yaitu Hillary Clinton sebagai tanggapan atas ketidakseimbangan dalam fokus global Amerika Serikat, bangkitnya Cina sebagai kekuatan baru, dan peningkatan ekonomi di Indo-Pasifik. Strategi ini bertujuan untuk mencurahkan usaha yang lebih banyak dalam mengamankan kepentingan dan kepemimpinan Amerika Serikat dengan mempengaruhi perkembangan di Asia Pasifik. Selain itu, *rebalancing* akan disertai dengan pembentukan dan peningkatan sejumlah basis Amerika Serikat di Asia Pasifik.⁴³ Bukti pertama yang terjadi adalah ketika kunjungan Obama ke Australia di mana dia mengumumkan penggelaran sekitar 2.500 marinir ke utara Australia yang berfungsi sebagai kekuatan yang stabil dan mengimbangi ketegasan China yang tumbuh di wilayah tersebut.⁴⁴

[main-focus-of-us-foreign-policy/a-15522953](http://www.issra.org/main-focus-of-us-foreign-policy/a-15522953) , diakses pada 15 Febuari 2018.

⁴¹ Colonel Chris Mills, Loc. Cit.

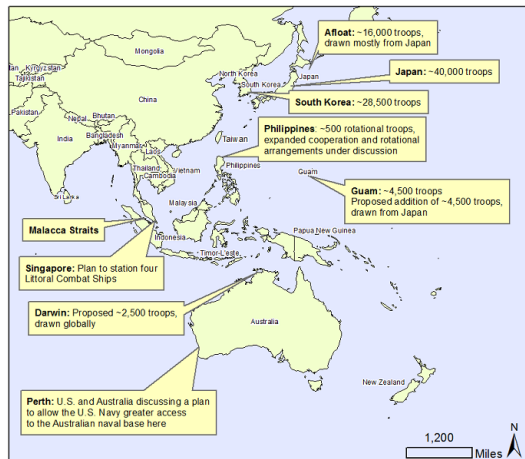
⁴² Ms. Beenish Sultan, “US Asia Pivot Strategy: Implications for the Regional States” dalam http://www.ndu.edu.pk/issra/issra_pub/articles/issra-paper/ISSRA_Papers_Vol5_IssueI_2013/07-US-Asia-Pivot-Strategy-Ms-Beenish-Sultan.pdf , diakses pada 15 Febuari 2018.

⁴³ Colonel Chris Mills, Loc. Cit.

⁴⁴ DW, Loc. Cit.

Pada pertengahan 2012, sifat komprehensif kebijakan “*rebalancing*” Amerika Serikat telah berganti dengan fokus pergeseran militer ke Asia dan penguatan keamanan regional. Hal ini merupakan langkah terencana atas pergeseran 60% angkatan laut dan angkatan udara Amerika Serikat ke wilayah Indo-Pasifik pada tahun 2020. Berikut adalah pengeralahan pasukan Amerika Serikat dan rencana Amerika Serikat dalam “*rebalancing*” di Asia Pasifik.⁴⁵

Gambar 2.1 Pengeralahan Pasukan dan Rencana AS dalam *Rebalancing*



Sumber: Colonel Chris Mills, “*The United States’ Asia-Pacific Policy and the Rise of the Dragon*”

Beberapa tahun setelah strategi ini diumumkan dan diterapkan, Amerika Serikat memperoleh beberapa keberhasilan seperti pengaturan peningkatan keamanan AS dengan sejumlah negara Asia Tenggara, perpanjangan pakta keamanan antara AS dan India, komitmen AS dan Cina mengenai perubahan iklim dan meningkatkan pengaruh AS

⁴⁵ Colonel Chris Mills, Loc. Cit.

dalam mengusulkan perjanjian perdagangan Trans Pacific Partnership.⁴⁶

⁴⁶ Ibid.